



Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Nur Assyafaah¹, Timbul Dompok², Lubna Salsabila³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

¹nurassyafaah08@gmail.com

²timbul.dompok@puterabatam.ac.id

³lubna.salsabila@puterabatam.ac.id

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu utama yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Berbagai program telah dilaksanakan guna mengurangi angka kemiskinan, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Batam serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, permasalahan dalam distribusi bantuan dan kurangnya koordinasi antarinstansi masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan sinergi antarinstansi guna memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: kemiskinan, pemerintah, upaya.

Abstract

Poverty in Indonesia is still a major issue that requires serious attention from the government. Various programs have been implemented to reduce poverty, but their effectiveness is still questionable. This research aims to analyze the government's efforts to overcome poverty in Indonesia and evaluate the effectiveness of the programs that have been implemented. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that programs such as the Family Hope Program (PKH), Cash Social Assistance (BST), and the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have contributed to reducing poverty. However, problems in the distribution of assistance and lack of coordination between agencies are still an obstacle in the implementation of these policies. Therefore, it is necessary to increase transparency and synergy between agencies to ensure that poverty alleviation programs run more effectively and on target.

Keywords: efforts, government, poverty.

1. Pendahuluan

Salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia adalah kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia adalah 9,03% pada tahun 2024, namun angka ini jauh lebih tinggi di beberapa daerah, seperti di Pegunungan Papua yang mencapai 32,97%. Karena setiap daerah memiliki populasi, sumber daya, dan karakteristik yang berbeda, ketimpangan pendapatan terjadi di tempat yang berbeda (Kunenengan et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara daerah maju dan daerah tertinggal, yang disebabkan oleh beberapa isu, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, kesempatan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan.^{4rf}

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) Tahun 2024

38 Provinsi	Jumlah
ACEH	14,23
SUMATERA UTARA	7,99
SUMATERA BARAT	5,97
RIAU	6,67
JAMBI	7,10
SUMATERA SELATAN	10,97
BENGKULU	13,56
LAMPUNG	10,69
KEP.BANGKA BELITUNG	4,55
DKI JAKARTA	4,30
JAWA BARAT	7,46
DI YOGYAKARTA	10,83
JAWA TIMUR	9,79
BANTEN	5,84
JAWA TENGAH	10,47
BALI	4,00
NUSA TENGGARA BARAT	12,91
NUSA TENGGARA TIMUR	19,48
KALIMANTAN BARAT	6,32

KALIMANTAN TENGAH	5,17
KALIMANTAN SELATAN	4,11
KALIMANTAN TIMUR	5,78
KALIMANTAN UTARA	6,32
SULAWESI UTARA	7,25
SULAWESI SELATAN	8,06
SULAWESI TENGGARA	11,21
GORONTALO	14,57
SULAWESI BARAT	11,21
SULAWESI TENGAH	11,77
MALUKU	16,05
MALUKU UTARA	6,32
PAPUA BARAT	21,66
PAPUA BARAT DAYA	18,13
PAPUA	17,26
PAPUA SELATAN	17,44
PAPUA TENGAH	29,76
PAPUA PEGUNUNGAN	32,97
INDONESIA	9,03

(BPS Indonesia, 2024)

Tabel 2. Profil Kemiskinan Indonesia

Indikator Kemiskinan	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	25,90	25,22
Persentasi Penduduk Miskin (%)	9,36	9,03

(BPS Indonesia, 2024)

Kemiskinan tidak hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan kesenjangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan. Dalam konteks ini, kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang saling terkait, termasuk kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh kurangnya akses

terhadap sumber daya ekonomi, serta kemiskinan kultural yang muncul akibat pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang sulit beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi (Pratiwi et al., 2022). Hambatan terhadap kesempatan sosial yang berasal dari faktor internal seperti tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang belum optimal, menjadi penyebab utama sulitnya menanggulangi kemiskinan secara efektif (Risal et al., 2022).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia, produktivitas yang tidak memadai di bidang ini menyebabkan gaji yang rendah, yang selanjutnya memperburuk kemiskinan dengan menurunkan pendapatan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber inovasi sangat penting karena kinerja ekonomi suatu negara didasarkan pada kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan pendidikan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah. Seluruh rakyat Indonesia harus menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan. Untuk meningkatkan standar pendidikan, hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang (Mardiyah & Manulang, 2020).

Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam menekan angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2023), sekitar 40% penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan miskin, dengan standar garis kemiskinan ekstrem sebesar US\$3,2 per kapita per hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi rawan dan mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan akibat ketidakpastian ekonomi atau krisis yang muncul, seperti pandemi COVID-19 yang telah memburuk kondisi ekonomi global beberapa tahun terakhir (Sinurat, 2023).

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Salah satu institusi pemerintah daerah yang ditugaskan untuk melakukan urusan pemerintah wajib di bidang sosial adalah yang bertanggung jawab untuk pemberian kekuasaan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, manajemen bencana, dan manajemen pemakaman pahlawan. Ia juga mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kebijakan dan mempersiapkan inisiatif strategis untuk pengembangan perencanaan pembangunan nasional lintas sektor di bidang pengurangan kemiskinan dan pembentukan masyarakat. Setiap orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki hak atas kecukupan pangan dan perumahan, serta akses terhadap layanan sosial, kesehatan, dan perlindungan, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 166 tahun 2014, pemerintah berupaya untuk melaksanakan beberapa program yang terkait dengan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam hal ini. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai rencana dan program pemerintah pusat dan daerah secara metodis, terkoordinasi, dan bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin. Beberapa program utama yang dijalankan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial, mengingat lebih dari 99% perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor ini (Anugerah et al., 2021). UMKM sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat (Al Farisi et al., 2022).

Namun, meskipun berbagai program telah dilaksanakan, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola program-program tersebut (Herdi, 2024). Widodo (2021) menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus lebih bersifat sistematis, terukur, dan berbasis data yang akurat agar dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2022) dimana penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat melalui perumahan, khususnya dengan merestorasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan di kota Jambi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan dalam penanganan kemiskinan, yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Sementara itu kebaruan dalam penelitian ini, peneliti mengkonsepsikan terkait upaya pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan dengan menjelaskan beberapa upaya pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah dalam menjalankan program-program untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program-program tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis dan berbasis bukti bagi pemerintah dalam mencapai target pengurangan kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2025. Studi ini juga akan menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari berbagai inisiatif yang telah diterapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

2. Tinjauan Pustaka

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang sudah lama ada. Orang-orang biasanya menjadi miskin di masa lalu karena kurangnya sumber daya dan bukan kekurangan makanan. Mereka tidak dapat memanfaatkan fasilitas modern termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Secara umum, orang miskin adalah seseorang yang tidak menghasilkan cukup uang, merasa lemah secara alami atau akibat campur tangan eksternal, dan tidak mampu mendukung dirinya secara finansial (Faletehan, 2023).

Pemerintah di seluruh negara selalu khawatir tentang masalah kemiskinan. Menemukan solusi mendesak dalam upaya untuk mengakhiri kemiskinan menjadi kewajiban bersama, terutama bagi pemerintah sebagai pendukung dari proses meningkatkan kehidupan orang-orang dalam pemerintahan. Ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seseorang apakah mereka berhubungan dengan makanan atau tidak adalah definisi kemiskinan. Membandingkan tingkat konsumsi dari jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi oleh anggota rumah tangga atau

jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah dua cara untuk mengukur kemiskinan (Hilmi et al., 2022). Ketiadaan kebutuhan termasuk air bersih, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. hal-hal yang terkait langsung dengan standar hidup seseorang mendefinisikan kemiskinan. Kurangnya akses ke pekerjaan dan pendidikan yang akan memungkinkan seseorang untuk mengatasi kemiskinan dan mendapatkan hak untuk memilih adalah tanda lain dari Kemiskinan(Arfiani, 2020).

b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Ada empat jenis kemiskinan yang didasarkan pada variabel-variabel yang menjadikannya masalah yang beragam (Jacobus et al., 2018):

1. Kemiskinan Absolut, Seseorang atau kelompok dianggap hidup dalam kemiskinan absolut ketika pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menutupi biaya-biaya penting seperti perumahan, makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan-semuanya sangat penting untuk meningkatkan standar hidup mereka-dan berada di bawah batas kemiskinan federal. Garis kemiskinan adalah jumlah rata-rata yang dihabiskan atau dikonsumsi untuk kebutuhan yang terkait dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. Paling sering, frasa "kemiskinan mutlak" digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan apa artinya menjadi miskin, baik secara individual atau sebagai kelompok.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu disebabkan dari dampak inisiatif pembangunan yang belum mencapai semua lapisan sosial, menyebabkan perbedaan standar kesejahteraan atau ketidakesetaraan ekonomi. Daerah yang belum mendapatkan manfaat dari inisiatif pembangunan semacam ini dianggap sebagai daerah tertinggal.
3. Kemiskinan Kultural, merupakan hasil dari sikap dan perilaku seseorang atau suatu komunitas, yang biasanya dibentuk oleh budaya atau kebiasaan yang sebagian besar resisten terhadap penggunaan cara-cara kontemporer untuk meningkatkan kondisi kehidupan. Kebiasaan seperti itu dapat relatif bergantung pada orang lain, membuang-buang atau tidak pernah menghemat, melelahkan, dan kurang inovatif.
4. Kemiskinan Struktural, adalah Kemiskinan adalah jenis kemiskinan yang timbul dari tidak memiliki akses ke sumber daya, dan biasanya dikaitkan dengan struktur sosial-budaya atau politik sosial yang menentang upaya untuk mengurangi kemiskinannya.

Selain itu, kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yaitu (Syahri et al., 2020):

- a. Kemiskinan Alamiah, dikaitkan pada kekurangan sumber daya umum serta alam dan kondisi tanah tandus.
- b. Kemiskinan Buatan, Sebagian besar berasal dari modernisasi atau sistem pengembangan yang membuat peradaban tidak mampu mengelola sumber daya keuangan, praktik, dan infrastruktur saat ini secara adil.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara dapat meningkat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi. Akibatnya, mempekerjakan orang yang membutuhkan pekerjaan dapat mengurangi jumlah posisi yang tersedia.

b. Tingkat pengangguran meningkat di masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan di negara tersebut. Akibatnya, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan akan meningkat.

c. Pendidikan yang tidak memadai. Orang yang berpendidikan rendah biasanya tidak memiliki kemampuan, kebijaksanaan, atau informasi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Orang yang berpendidikan rendah menjadi kurang kompetitif sehingga meningkatkan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan.

d. Bencana alam. Dapat menyebabkan orang kehilangan harta benda mereka, yang dapat membuat mereka jatuh miskin.

e. Alokasi pendapatan yang tidak merata. Pola kepemilikan yang tidak seimbang dapat diakibatkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk yang memiliki sedikit sumber daya cenderung berada di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan juga dapat menimbulkan dampak tambahan. Yang pertama adalah meningkatnya kriminalitas lokal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan individu yang miskin untuk melakukan segala cara, termasuk kegiatan kriminal, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, tingkat kematian yang lebih tinggi. Angka kematian penduduk dapat meningkat sebagai akibat dari ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Ketiga, tidak ada lagi akses pendidikan. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dapat memperburuk kondisi kemiskinan di sebuah negara. Keempat, angka pengangguran meningkat. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas akan sulit diperoleh oleh mereka yang berada dalam kemiskinan. Akibatnya, masyarakat miskin akan sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Kelima, meningkatnya konflik antar masyarakat (Wulandari et al., 2022).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memahami mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta masyarakat penerima manfaat program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, survei dilakukan kepada penerima manfaat guna mendapatkan perspektif langsung terkait efektivitas program.

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang relevan terkait kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah melihat dan menilai apa upaya program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sosial ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Program bantuan sosial yang diterapkan pemerintah seperti PKH dan BST terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin menurun dari 25,90 juta jiwa pada 2023 menjadi 25,22 juta jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas implementasinya.

Informasi yang didapatkan melalui penerima bantuan menunjukkan bahwa PKH telah memberikan dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, masih ditemukan kendala dalam distribusi bantuan yang tidak selalu tepat sasaran. Beberapa penerima merasa bahwa bantuan yang mereka terima belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun bantuan telah tersalurkan, nominal bantuan yang diberikan masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima diberbagai daerah.

Disisi lain, program UMKM juga memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan akses modal usaha dan kurangnya pelatihan keterampilan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan, masih diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam aspek pendanaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Rastra adalah inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan menyediakan kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, beberapa program ini dibuat tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

4.2 Pembahasan

Meskipun beberapa program telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka kemiskinan, masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan data penerima bantuan, yang menyebabkan adanya penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat, sementara kelompok yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan yang layak.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan guna menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan efektivitas program. Pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri melalui pemberdayaan ekonomi.

Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia adalah mengurangi kemiskinan. Pemerintah saat ini melakukan sejumlah langkah terpadu untuk memerangi kemiskinan, seperti yang berpusat pada pemberdayaan perusahaan kecil, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Berbagai organisasi pemerintah pusat dan daerah mengawasi program-program ini. BPS mencatat banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 sebesar 25,90 jiwa sedangkan pada

tahun 2024 sebesar 25,22 jiwa. Dari data tersebut bisa kita gambarkan bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2024. Ini berarti program yang dijalankan oleh pemerintah sudah berhasil. Tingkat perekonomian di Indonesia juga sudah naik 5%. Pemerintah melakukan segala upaya dalam mengatasi tingkat kemiskinan yaitu dengan beberapa program sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Tunai (BST): adalah program yang memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat yang terdampak krisis ekonomi. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi. Penerima BST diwajibkan untuk mendaftarkan diri dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial lainnya. Jumlah bantuan bervariasi berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini dan dicairkan melalui kantor pos atau transfer bank.

2. Program Keluarga Harapan (PKH): adalah program jaminan sosial yang membantu keluarga berpenghasilan rendah dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil dan anak usia sekolah. Tujuan program ini adalah untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. PKH telah menjangkau jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS): Untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, KIP menawarkan bantuan pendidikan agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Untuk masyarakat kurang mampu, KIS menawarkan asuransi kesehatan. Tentu saja, tujuan dari kedua inisiatif ini adalah untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Program Beras Sejahtera (Rastra): program ini menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi keluarga miskin. Rastra bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok dan meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama di daerah rawan pangan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): melalui ketersediaan keuangan dan pelatihan keterampilan yang lebih baik. Program ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Beberapa program ini tentunya dibuat untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, instruksi ini mengamanatkan 22 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan target penurunan angka kemiskinan hingga 0% pada tahun 2024. Hal ini mencakup metode untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan di beberapa daerah, dan menurunkan kewajiban pengeluaran. Upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan antara lain dengan memusatkan perhatian pada jalur pembangunan, yang mencakup lima topik:

1. Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
2. Mendorong kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan dan memperluas jangkauan inisiatif pembangunan berbasis masyarakat.
4. Mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan-layanan penting.
5. Menciptakan dan meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Sangatlah menantang untuk mengatasi masalah kemiskinan di seluruh dunia. Berikut ini adalah 16 strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan:

- a. Mencabut larangan impor beras
- b. Terus meningkatkan standar dan efektivitas sekolah dasar, berinvestasi di bidang pendidikan dengan penekanan terhadap perluasan akses ke sekolah menengah, membuatnya lebih terjangkau, dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu.
- c. Melakukan investasi pada bidang kesehatan dengan penekanan terhadap peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan dasar, baik publik maupun swasta.
- d. Persentase angka kematian ibu di Indonesia sangat tinggi sehingga membutuhkan perhatian ekstra.
- e. Menggunakan berbagai taktik di daerah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kualitas air bagi masyarakat miskin.
- f. Mengatasi krisis sanitasi bagi masyarakat miskin di Indonesia.
- g. Memulai program yang komprehensif untuk membiayai jalan desa.
- h. Memperluas strategi pembangunan berbasis masyarakat (community-based development/CBD) yang efektif di Indonesia ke tingkat nasional.
- i. Menciptakan sistem jaminan sosial secara menyeluruh yang memperhitungkan bahaya dan kelemahan yang dihadapi masyarakat miskin hingga hampir miskin.
- j. Memulihkan penelitian dan penyuluhan serta berinvestasi dalam infrastruktur untuk merevitalisasi pertanian.
- k. Mempercepat proses sertifikasi tanah dan memanfaatkan tanah yang tandus dan tidak dapat digunakan dengan baik.
- l. Memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam undang-undang ketenagakerjaan.
- m. Meningkatkan akses terhadap kredit komersial untuk usaha mikro dan kecil serta memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu.
- n. Meningkatkan penekanan pada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan nasional.
- o. Melaksanakan inisiatif peningkatan ruang untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisir, membiayai, dan mengimplementasikan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.
- p. Membuat program-program kemiskinan dipantau dan ditinjau secara lebih ketat.

Program bantuan sosial memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, tetapi efektivitasnya masih terkendala oleh beberapa isu, seperti ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran. Sistem data terpadu seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) terus diperbarui untuk memastikan bahwa bantuan mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun tantangan seperti akses pendidikan di daerah terpencil dan biaya kesehatan yang masih tinggi bagi sebagian masyarakat tetap menjadi hambatan.

Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui program Dana Desa dan pemberdayaan UMKM. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, tantangan dalam pengelolaan Dana Desa masing sering muncul, seperti kurangnya kapasitas manajerial di tingkat lokal. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil merupakan kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Namun, koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan optimalisasi anggaran.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemerintah seperti PKH, BST, dan pemberdayaan UMKM telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, tantangan dalam distribusi bantuan, validitas data penerima, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan akurasi sistem pendataan penerima bantuan, memperluas akses permodalan bagi UMKM, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Integrasi antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti dampak jangka panjang dari program pengentasan kemiskinan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif antarprovinsi untuk melihat efektivitas kebijakan di berbagai daerah dan menentukan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya.

Daftar Pustaka

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). PERAN UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772>
- Arfiani, D. (2020). *Berantas Kemiskinan*. Alprin.
- Faletahan, A. F. (2023). Kemiskinan Kronis Berkelanjutan di Masyarakat Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 18–28. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.50290>
- Herdi, A. A. H. (2024, November 17). Ekonomi RI Tumbuh 5%, Prabowo Sebut Kemiskinan Masih Tinggi. *Detik Finance*.
- Hilmi, H., Nasir, M., Ramlawati, R., & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.

- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 3).
- Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 133–144.
- Mardiyah, A., & Manulang, R. (2020). *KEMISKINAN: Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Risal, M., & Siradjuddin, S. (2022). Meningkatkan Peran Usaha Kecil dan Mikro Syariah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.300>
- Saputra, J. (2022). Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(2). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1524>
- Sinurat, R. P. P. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Registratie*, 5(2). <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 1(1), 34–43.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218.